



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Februari 2021

Halaman: 1

INSENTIF NAKES BELUM CAIR

● Pemkot Yogyakarta Surati Kemenkes

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak 502 tenaga kesehatan (nakes) di Kota Yogyakarta yang menangani Covid-19 harus bersabar, setelah insentif yang sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat terlambat turun. Tunggakan pembayaran itu terjadi selama tiga bulan, terhitung sejak Oktober hingga Desember 2020.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi pun membenarkan polemik keterlambatan pembayaran insentif terhadap nakes di Kota Yogyakarta. Ia berujar, total tunggakan, mencapai Rp5,7 miliar. "Yang belum men-

Yang belum mendapatkan insentif itu, nakes dari puskesmas dan rumah sakit.

Heroe Poerwadi

● ke halaman 11

Insentif Nakes Belum Cair

• Sambungan Hal 1

dapatkan insentif itu, nakes dari puskesmas dan rumah sakit," ungkapnya, Selasa (16/2).

Wakil Wali Kota Yogyakarta tersebut memastikan bahwa pihaknya pun tidak tinggal diam dalam permasalahan ini. Ia menuturkan, pemkot telah melayangkan surat, ditujukan kepada Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI untuk menanyakan kejelasan mengenai insentif nakes. "Ya, satu minggu yang lalu kita sudah kirimkan surat ke Kemkes," terang Heroe.

Ia menyampaikan, jumlah paramedis yang bertugas di garda terdepan penanganan Covid-19 di kota pelajar saat ini menyentuh 502 orang.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman, Joko Hastaryo menuturkan,

penunggakan insentif para nakes di wilayahnya terjadi pada periode September dan Desember 2020. Dia merinci, pembayaran insentif dilakukan per termin. Misalnya insentif di bulan Maret hingga Mei dibayarkan bulan Agustus. Kemudian bulan Juni hingga Agustus dibayarkan pada Oktober. "Untuk nakes yang di puskesmas insentif hanya diterima sampai bulan Agustus," jelasnya.

Joko mengungkapkan, adanya keterlambatan itu dipengaruhi oleh masalah teknis administratif. "Karena aturan dari pusat yang berubah-ubah sehingga faskes jadi gamang untuk mengurusnya," jelasnya.

Joko menuturkan, kebijakan yang kerap berubah itu berdampak pada proses pencairan insentif. Sebagian fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) bahkan enggan mengurus pencairan karena merasa jengkel.

"Misalnya rumus yang dipakai, semula hari kerja

sebagai pembagi ditetapkan 22 hari, ternyata di aturan berikutnya 14 hari. Padahal sudah telanjur pada tanda tangan penerimaan, harus mengubah lagi. Setelah diubah ada perubahan aturan lagi dan saya lupa karena saking banyaknya perubahan," tuturnya.

Membenarkan

Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) DIY, Tri Prabowo mengakui kebenaran perihal adanya nakes yang pembayaran insentifnya tersendat. Namun, ia tidak mengetahui kondisi keseluruhan secara pasti.

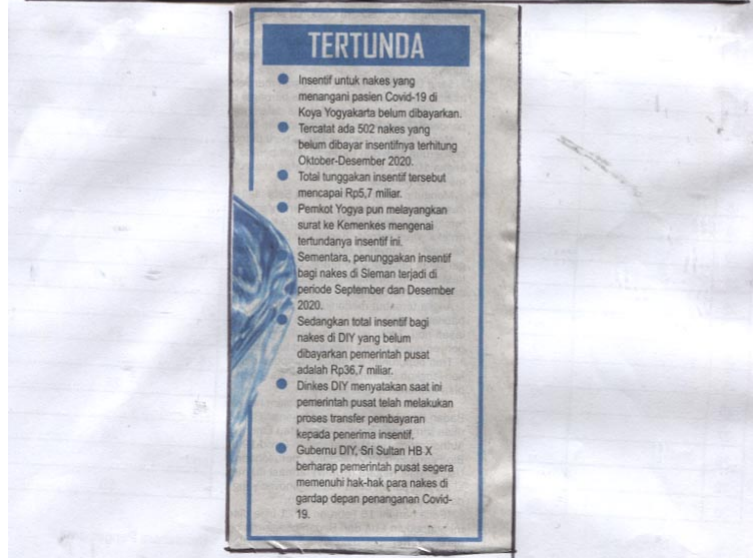
"PPNI enggak tahu kondisinya. Kami tidak langsung (menangani). RS (rumah sakit) itu kan kalau yang tanya organisasi profesi mereka tidak memberi suatu kepastian, jadinya kami melalui teman-teman (anggota) yang ada di sana," ungkapnya saat dihubungi *Tribun Jogja*, Selasa (16/2).

Tri melanjutkan, berda-

sarkan laporan yang diterima dari beberapa tenaga kesehatan, insentif untuk penanganan Covid-19 yang mereka terima ada yang relatif lancar dan ada pula yang tersendat selama beberapa bulan.

"Ada yang mulus dan ada yang tidak, di RSUP dr Sardjito katanya lancar, yang belum turun hanya Desember. Di tempat lain ada yang sejak Oktober belum cair. Kondisinya beragam, tidak sama," bebernya.

Tri menuturkan, saat ini pihaknya sudah diminta oleh PPNI pusat untuk menghimpun data tenaga kesehatan di DIY yang insentifnya tersendat. "Saya ditanya juga oleh pusat, PPNI pusat sudah berupaya menghimpun data se-Indonesia. Data yang sudah masuk ke saya dari Sleman, Bantul, dan Kota. Masih menunggu sisanya. PPNI pusat akan memediasi dan memfasilitasi ada apa sebenarnya," paparnya. **(aka/ro/uti)**



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005